SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 3, July 2025

Pengaruh Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Good Governance di Kantor PEMDA Kabupaten Bengkulu Selatan

Zhendrina Febriani[1], Fathul Hilal Perdanakusuma[2], Winny Lian Seventeen[3]
Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia
zhendrinaf21@gmail.com[1], fathul.hilal.5758@gmail.com[2], wlseventeen@gmail.com[3]

Submitted: 21st May 2025 | **Edited**: 28th June 2025 | **Issued**: 01st July 2025

Cited on: Febriani, Z., Perdanakusuma, F. H., & Seventeen, W. L. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Good Governance di Kantor Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8*(3), 1155-1162.

ABSTRACT

This study investigates the influence of internal control, human resources, and accounting information systems on the implementation of good governance at the Regional Government Office of South Bengkulu Regency. The study is motivated by ongoing challenges in regional governance, particularly in areas with limited infrastructure and administrative capacity. The objective is to examine how these three organizational factors contribute to the effectiveness of public governance practices. Using a quantitative approach with a survey method, data were collected from 88 civil servants (ASN) selected through purposive sampling. The research employed multiple linear regression analysis to test partial and simultaneous effects. The results show that internal control and human resources significantly affect good governance, while the accounting information system does not have a significant individual effect. However, when analyzed simultaneously, all three variables show a significant influence. Among them, human resources have the most dominant effect. These findings highlight the importance of enhancing the quality and competence of public sector employees and strengthening control systems to improve transparency, accountability, and efficiency in local governance. This research contributes to the public sector accounting literature and provides practical recommendations for improving organizational management in regional governments.

Keywords: Internal Control, Human Resources, Accounting Information System, Good Governance, Regional Government

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka desentralisasi yang diterapkan di Indonesia, tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik berpindah ke daerah sehingga menuntut penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang kuat. *Good governance* menjadi prasyarat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta penggunaan anggaran yang bertanggung jawab (Sutaryo, 2019; Mardiasmo, 2021).

Prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 2020) mencakup partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. Di lingkungan pemerintahan daerah, implementasi prinsip tersebut bergantung pada keberadaan sistem dan sumber

daya yang memadai, seperti pengendalian internal, sumber daya manusia (SDM), serta sistem informasi akuntansi (SIA) yang efektif dan terintegrasi (Winarno & Fatmawati, 2022).

Pengendalian internal diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai tujuan serta sesuai regulasi yang berlaku. COSO (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pencegah penyimpangan, mendukung efektivitas operasional, dan menjamin keandalan pelaporan keuangan. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa di banyak daerah, pengendalian internal masih bersifat formalitas dan belum terimplementasi secara menyeluruh (Puspitasari & Pertiwi, 2021; Wahrudin & Arifudin, 2020).

Selain itu, kualitas SDM turut menentukan keberhasilan penerapan *good governance*. ASN yang kompeten, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki integritas tinggi cenderung mampu menjalankan tugas secara akuntabel dan efisien (Mulyadi, 2020; Fadhilah & Nugroho, 2021). Namun, masih banyak daerah yang menghadapi persoalan rendahnya kualitas pelatihan, rotasi pegawai yang tidak tepat, serta kurangnya insentif profesionalitas (Ulfa, 2022).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga merupakan faktor penting yang mendukung transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. SIA berperan dalam memproses dan menyajikan informasi keuangan yang relevan secara real time bagi pengambilan keputusan publik (Romney & Steinbart, 2018). Meski demikian, kendala seperti keterbatasan infrastruktur TI, rendahnya literasi digital pegawai, dan minimnya integrasi sistem masih menjadi hambatan utama di tingkat daerah (DeLone & McLean, 2019; Chye & Han, 2018).

Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi objek yang relevan untuk dikaji karena masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi *good governance*, seperti keterbatasan teknologi informasi, pengawasan internal yang belum optimal, serta kualitas SDM yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal, sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi terhadap penerapan good governance di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya ketiga variabel tersebut secara terpisah, namun kajian yang menguji ketiganya secara simultan dalam konteks daerah berkembang masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur (research gap) terkait determinan utama *good governance* di sektor publik, khususnya pada level pemerintah daerah dengan keterbatasan kapasitas administratif.

LANDASAN TEORI

Good Governance

Good governance adalah prinsip tata kelola organisasi publik yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum (UNESCAP, 2021). Dalam konteks pemerintahan daerah, good governance berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai sejauh mana pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara bertanggung jawab dan pro-rakyat. Implementasi prinsip ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rosid et al., 2021).

Menurut Setyaningrum (2020), pencapaian good governance bergantung pada sinergi antara struktur organisasi, proses manajerial, dan kapabilitas SDM yang

mengelola sistem pengendalian dan informasi. Oleh karena itu, untuk memahami faktor-faktor penentu good governance, diperlukan kajian teoritis atas tiga aspek utama: pengendalian internal, sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi.

Teori Pengendalian Internal

Pengendalian internal merujuk pada sistem kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, menjamin akurasi pelaporan keuangan, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi (Arens et al., 2020). Model COSO (2017) membagi pengendalian internal ke dalam lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Dalam lingkungan pemerintahan, pengendalian internal berperan dalam mengurangi risiko penyelewengan anggaran dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Kinerja pengendalian internal yang baik akan mempermudah pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut kebijakan secara tepat sasaran (Nurlis & Yaya, 2021).

Teori Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut teori sumber daya manusia modern, organisasi publik dituntut untuk memiliki pegawai yang kompeten, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebijakan (Dessler, 2020). Kompetensi ASN meliputi tiga aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang keseluruhannya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Studi oleh Adnan et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM berkorelasi positif dengan pencapaian indikator good governance, seperti akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, pengembangan SDM secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan responsivitas birokrasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang dinamis (Handayani & Wahyuni, 2022).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

SIA merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang memproses data keuangan dan menghasilkan laporan yang relevan bagi pengambilan keputusan (Gelinas et al., 2019). Dalam pemerintahan, SIA menjadi instrumen vital untuk menjaga akurasi pelaporan keuangan, efisiensi pencatatan transaksi, dan transparansi keuangan publik.

Model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone & McLean (2003) yang diperbarui oleh Petter et al. (2020) menekankan pentingnya kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna sebagai determinan keberhasilan implementasi SIA. Studi oleh Nasution dan Fauziah (2021) juga mengonfirmasi bahwa SIA yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung penerapan prinsip good governance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu pengendalian internal, sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen yaitu *good governance*. Pendekatan ini digunakan karena sesuai untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel secara empiris melalui data numerik yang diolah secara statistik (Sugiyono, 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 102 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: ASN tetap, telah bekerja minimal satu tahun, dan memiliki pendidikan terakhir minimal sarjana (S1). Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang ditetapkan

adalah 88 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert 5 poin, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Kuesioner disusun berdasarkan indikator teoritis dari masing-masing variabel dan telah melalui uji validitas isi oleh pakar akademik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 25. Prosedur analisis diawali dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi item-total, sementara uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan nilai minimal 0,70 sebagai batas reliabilitas yang dapat diterima (Hair et al., 2020).

Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (VIF dan tolerance), dan uji heteroskedastisitas (uji Glejser). Setelah memenuhi asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan antara variabel independen terhadap *good governance*. Uji parsial dilakukan dengan menggunakan uji t, sedangkan uji simultan menggunakan uji F. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi ketiga variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen.

Pemilihan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya dalam mengidentifikasi pengaruh langsung antarvariabel dan memberikan dasar yang kuat untuk generalisasi temuan pada populasi yang lebih luas (Neuman, 2020). Dengan rancangan metode yang sistematis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di daerah.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi terhadap good governance pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Analisis dilakukan secara parsial dan simultan melalui uji regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Good Governance

Hasil uji t menunjukkan bahwa pengendalian internal (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar -2,521 dan koefisien regresi negatif (-0,116). Hal ini menandakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap good governance, namun dengan arah yang negatif.

Secara konseptual, pengendalian internal semestinya mendukung pelaksanaan good governance melalui fungsi pengawasan, pencegahan fraud, dan kepatuhan terhadap regulasi (Arens et al., 2020). Namun, arah negatif pada hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi pengendalian internal di Pemda Bengkulu Selatan cenderung bersifat birokratis dan tidak adaptif, sehingga menghambat efisiensi dan pengambilan keputusan cepat yang merupakan bagian dari prinsip good governance.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Egi (2022) dan Cassandra (2017), yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak selalu memberikan dampak positif apabila tidak diiringi dengan pelaksanaan yang fleksibel dan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi. Selain itu, penelitian Nasution dan Fauziah (2021) juga menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal di instansi pemerintah daerah berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas dan transparansi.

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Good Governance

Variabel sumber daya manusia (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 7,082 dan koefisien regresi positif. Hasil ini menunjukkan bahwa SDM berpengaruh signifikan secara positif terhadap good governance.

Temuan ini menguatkan teori kompetensi SDM yang menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional ASN merupakan faktor penentu keberhasilan tata kelola sektor publik (Dessler, 2020). SDM yang berintegritas dan kompeten akan lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Hasil ini sejalan dengan temuan Adnan et al. (2021), yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM secara langsung memperbaiki praktik good governance. Demikian pula dengan penelitian Handayani dan Wahyuni (2022) yang menekankan pentingnya pelatihan dan rotasi jabatan berbasis kompetensi dalam mendukung reformasi birokrasi.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Good Governance

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 4,065 dan koefisien regresi positif. Ini berarti SIA berpengaruh signifikan terhadap good governance.

SIA berfungsi sebagai instrumen teknis dalam mengolah data keuangan, mendukung pelaporan tepat waktu, serta memudahkan proses audit dan pengawasan internal (Gelinas et al., 2019). Di lingkungan Pemerintah Daerah, SIA yang baik akan mempercepat aliran informasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian Chye dan Han (2018) yang menunjukkan bahwa implementasi SIA secara terintegrasi meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga publik. Selain itu, studi oleh Petter et al. (2020) menemukan bahwa keberhasilan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan kualitas informasi, yang semuanya berkaitan erat dengan prinsip good governance.

Pengaruh Pengendalian Internal, SDM, dan SIA secara Simultan terhadap Good Governance

Uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap good governance (nilai signifikansi < 0,05). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,886 menunjukkan bahwa 88,6% variasi dalam penerapan good governance dapat dijelaskan oleh pengendalian internal, sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan struktur birokrasi.

Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Nurlis dan Yaya (2021), yang menekankan pentingnya sinergi antara aspek teknis dan non-teknis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Ketiga variabel yang diteliti dalam penelitian ini saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Dengan demikian, untuk mewujudkan *good governance*, Kantor Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan perlu melakukan pendekatan holistik dengan memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kapasitas SDM, dan mengoptimalkan sistem informasi akuntansi secara simultan dan terintegrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengaruh pengendalian internal, sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi terhadap good governance di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan:

1. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap good governance, namun arah pengaruhnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan, pelaksanaannya kemungkinan masih bersifat birokratis dan tidak fleksibel. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas menjadi tidak efisien, yang justru menghambat pencapaian prinsip good governance. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan implementasi pengendalian internal agar lebih adaptif, partisipatif, dan mendukung efisiensi organisasi.
2. Sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap good governance. Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif. Kualitas SDM yang unggul memungkinkan terciptanya pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Maka dari itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, serta penilaian kinerja berbasis kompetensi menjadi langkah strategis.
3. Sistem informasi akuntansi juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap good governance. Implementasi SIA yang baik mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Di Kantor Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan, sistem ini memainkan peran kunci dalam mendukung transparansi dan pengawasan keuangan publik secara digital.
4. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap good governance dengan koefisien determinasi sebesar 88,6%. Ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pengendalian internal, SDM, dan SIA secara bersama-sama berkontribusi besar terhadap keberhasilan implementasi prinsip-prinsip good governance. Sinergi antara ketiganya merupakan prasyarat untuk membangun birokrasi yang profesional dan terpercaya.
5. Dari ketiga variabel yang diteliti, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi good governance, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t hitung tertinggi dan signifikansi paling kuat. Hal ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan kapasitas aparatur sipil negara menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan menegaskan pentingnya sinergi antar faktor organisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di daerah dengan kapasitas administratif terbatas. Sementara secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan birokrasi melalui reformasi pengendalian internal, peningkatan kualitas SDM, dan optimalisasi sistem informasi akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. A., Ramadhani, F., & Mahmudah, S. N. (2021). Kompetensi aparatur sipil negara dan pengaruhnya terhadap good governance di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi, 8*(1), 35–48.

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and assurance services* (17th ed.). Pearson.

Cassandra, Y. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan akuntabilitas publik terhadap good governance pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik, 8*(2), 120–134.

Chye, K. T., & Han, L. T. (2018). Accounting information system and good governance: Evidence from local government units. *International Journal of Public Sector Management, 31*(4), 412–430.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2019). Measuring information systems success: Updated model and implications. *Journal of Information Systems Research, 30*(2), 47–65.

Dessler, G. (2020). *Human resource management* (16th ed.). Pearson Education.

Egi, R. (2022). Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 11*(1), 33–44.

Fadhilah, N., & Nugroho, R. (2021). Kompetensi ASN dan kinerja pelayanan publik: Studi pada pemerintah kabupaten. *Jurnal Administrasi Publik, 8*(1), 20–31.

Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. R. (2019). *Accounting information systems* (11th ed.). Cengage Learning.

Handayani, R., & Wahyuni, S. (2022). Strategi pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10*(2), 112–124.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Ed. revisi). Yogyakarta: Andi.

Mulyadi, D. (2020). Pengaruh SDM dan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem akuntansi pemerintahan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 5*(2), 77–89.

Nasution, M. K., & Fauziah, L. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit Publik, 6*(1), 14–27.

Nurlis, & Yaya, R. (2021). Internal control and its implications on the quality of financial reporting in local governments. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 7*(2), 111–123.

Petter, S., DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2020). Measuring information systems success: Updated perspectives. *Journal of the Association for Information Systems, 21*(6), 1321–1354.

Puspitasari, D., & Pertiwi, N. (2021). Efektivitas sistem pengendalian internal dalam tata kelola pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 10*(1), 101–115.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson Education.

Rosid, A., Pratama, A. B., & Taufik, T. (2021). Good governance and tax compliance: Evidence from local governments. *Jurnal Kebijakan Publik, 12*(1), 1–15.

Setyaningrum, D. (2020). Governance structure and accountability in Indonesian public sector: A conceptual approach. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22*(2), 85–95.

Sutaryo. (2019). *Good governance dan audit kinerja sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Ulfa, A. N. (2022). Profesionalisme ASN dan penerapan good governance di sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9*(1), 44–56.

UNDP. (2020). *Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.

UNESCAP. (2021). *What is good governance?* United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

Wahrudin, D., & Arifudin, A. (2020). Evaluasi pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah, 4*(1), 13–24.

Winarno, A., & Fatmawati, Y. (2022). Peran sistem informasi akuntansi dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 14*(1), 33–45.